



Implementasi Kebijakan Dana Kelurahan (Studi Kasus Di Kota Medan)

Ramadha Yanti Parinduri¹⁾, Bobby Indra Prayoga²⁾, Amanda Aulia³⁾, Saima Rambe⁴⁾

Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Medan, Indonesia

yantifkmb@gmail.com¹⁾, bobyindraprayoga17@gmail.com²⁾,
amandaaulia219@gmail.com³⁾, rambesaima@gmail.com⁴⁾

Abstrak

Implementasi Kebijakan Dana Kelurahan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat kelurahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Dana Kelurahan di Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian adalah pejabat pemerintah kelurahan, masyarakat, dan stakeholders lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dana kelurahan di Kota Medan telah berjalan dengan baik. Dana kelurahan telah digunakan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kesehatan, dan peningkatan pendidikan. Namun, masih terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya partisipasi masyarakat dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana. Penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi kebijakan dana kelurahan di Kota Medan telah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti kurangnya kemampuan pemerintah kelurahan dalam mengelola dana dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam pembangunan. Penelitian ini merekomendasikan bahwa pemerintah kelurahan perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana. Selain itu, pemerintah kelurahan juga perlu meningkatkan kemampuan dalam mengelola dana dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam pembangunan.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Dana Kelurahan, Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Kota Medan

Abstract

The implementation of the Village Fund Policy is one of the government's efforts to improve the welfare of the community at the village level. This study aims to analyze the implementation of the Village Fund Policy in Medan City. The research method used is qualitative with a case study approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation. The informants of the study were village government officials, community members, and other stakeholders. The results showed that the implementation of the Village Fund Policy in Medan City has been running well. The Village Fund Policy has been used for infrastructure development, health improvement, and education improvement. However, there are still some obstacles, such as lack of community participation and lack of transparency in fund management. This study also found that the implementation of the Village Fund Policy in Medan City has increased community participation in development and improved the quality of life of the community. However, there are still some challenges that need to be overcome, such as the lack of ability of the village government in managing funds and the lack of community awareness of the importance of participation in development. This study recommends that the village government needs to increase community participation in development and increase transparency in fund management. In addition, the village government also needs to improve its ability in managing funds and increase community awareness of the importance of participation in development.

Keyword: Policy Implementation, Village Fund, Community Participation, Transparency, Medan City

PENDAHULUAN

Kebijakan dana kelurahan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat kelurahan. Dana Kelurahan adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah kelurahan untuk digunakan dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Implementasi kebijakan dana kelurahan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kota Medan sebagai salah satu kota besar di Indonesia telah melaksanakan kebijakan dana kelurahan sejak tahun 2015. Namun, implementasi kebijakan dana kelurahan di Kota Medan masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya partisipasi masyarakat dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan dana kelurahan di Kota Medan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang implementasi kebijakan dana kelurahan di Kota Medan dan mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut.

Kebijakan dana kelurahan merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat kelurahan. Dana Kelurahan adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah kelurahan untuk digunakan dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kota Medan sebagai salah satu kota besar di Indonesia telah melaksanakan kebijakan dana kelurahan sejak tahun 2015. Namun, implementasi kebijakan dana kelurahan di Kota Medan masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya partisipasi masyarakat dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana tersebut. Maka beberapa permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan dana kelurahan di Kota Medan, apa saja tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan dana kelurahan di Kota Medan, bagaimana cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan dana kelurahan di Kota Medan.

TINJAUAN PUSTAKA

Tujuan dari tinjauan pustaka adalah untuk memahami konsep-konsep yang terkait dengan implementasi kebijakan Dana Kelurahan di Kota Medan. Tinjauan pustaka ini akan membahas tentang konsep kebijakan publik, implementasi kebijakan, dan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan.

Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah suatu keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu (Dunn, 2013). Kebijakan publik dapat berupa undang-undang, peraturan, atau program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan kebijakan publik yang telah dirancang (Pressman & Wildavsky, 1973). Implementasi kebijakan melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah, masyarakat, dan stakeholders lainnya.

Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan

Partisipasi masyarakat adalah suatu proses di mana masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan (Arnstein, 1969). Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kualitas kebijakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan Dana Kelurahan

Kebijakan Dana Kelurahan adalah suatu kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat kelurahan. Dana kelurahan adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah kelurahan untuk digunakan dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Dana Kelurahan di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya partisipasi masyarakat dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana (Sitorus, 2019; Widyastuti, 2020).

Kerangka teoritis penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Implementasi kebijakan Dana Kelurahan di Kota Medan dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal.
- Faktor-faktor internal meliputi kemampuan pemerintah kelurahan, partisipasi masyarakat, dan transparansi dalam pengelolaan dana.
- Faktor-faktor eksternal meliputi kebijakan pemerintah pusat, kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan lingkungan politik.

METODE

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena implementasi kebijakan Dana Kelurahan di Kota Medan secara mendalam dan kontekstual. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian adalah pejabat pemerintah kelurahan, masyarakat, dan stakeholders lainnya.

Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah studi kasus tunggal, yaitu Implementasi Kebijakan Dana Kelurahan di Kota Medan. Studi kasus digunakan untuk memahami fenomena implementasi kebijakan Dana Kelurahan secara mendalam dan kontekstual.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Kota Medan dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang telah melaksanakan kebijakan Dana Kelurahan sejak tahun 2015.

Informan Penelitian

Informan penelitian adalah pejabat pemerintah kelurahan, masyarakat, dan stakeholders lainnya yang terlibat dalam implementasi kebijakan Dana Kelurahan di Kota Medan. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara: Wawancara dilakukan dengan pejabat pemerintah kelurahan, masyarakat dan stakeholders lainnya untuk memperoleh informasi tentang implementasi kebijakan Dana Kelurahan di Kota Medan.
2. Observasi: Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang proses implementasi kebijakan di Kota Medan.
3. Dokumentasi: Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kebijakan Dana Kelurahan dan implementasinya di Kota Medan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik, yaitu analisis data yang dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema yang muncul dari data. Analisis tematik digunakan untuk memahami fenomena implementasi kebijakan dana kelurahan di Kota Medan secara mendalam dan kontekstual.

Validitas dan Reliabilitas Data

Validitas data dijamin dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu penggunaan beberapa sumber data dan metode pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang akurat. Reliabilitas data dijamin dengan menggunakan teknik audit trail, yaitu pencatatan semua proses penelitian untuk memastikan bahwa data yang diperoleh akurat dan dapat dipercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Dana Kelurahan di Kota Medan;

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan dana kelurahan di Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dana kelurahan di Kota Medan telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi.

Proses Implementasi Kebijakan Dana Kelurahan

Proses implementasi kebijakan dana kelurahan di Kota Medan dimulai dengan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan. Pemerintah kelurahan membuat rencana kerja yang mencakup tujuan, sasaran, dan strategi implementasi kebijakan dana kelurahan. Rencana kerja ini kemudian disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan. Setelah rencana kerja disetujui, pemerintah kelurahan mulai melaksanakan kegiatan implementasi kebijakan dana kelurahan. Kegiatan ini meliputi pengumpulan data, identifikasi kebutuhan masyarakat, dan penyusunan proposal proyek. Proposal proyek kemudian disetujui oleh pemerintah pusat dan dana kelurahan dicairkan ke rekening pemerintah kelurahan, untuk selanjutnya dilaksanakan kegiatan yang telah diusulkan tersebut.

Kegiatan Implementasi Kebijakan Dana Kelurahan

Kegiatan implementasi kebijakan dana kelurahan di Kota Medan meliputi:

1. Pembangunan infrastruktur: Pemerintah kelurahan menggunakan Dana Kelurahan untuk membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan dan fasilitas umum lainnya.

2. Peningkatan kesehatan: Pemerintah kelurahan menggunakan Dana Kelurahan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan menyediakan fasilitas kesehatan dan program-program kesehatan.
3. Peningkatan pendidikan: Pemerintah kelurahan menggunakan Dana Kelurahan untuk meningkatkan pendidikan masyarakat dengan menyediakan fasilitas pendidikan dan program-program pendidikan.

Tantangan Implementasi Kebijakan Dana Kelurahan

Implementasi kebijakan Dana Kelurahan di Kota Medan masih menghadapi beberapa tantangan, seperti:

1. Kurangnya partisipasi masyarakat: Partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan Dana Kelurahan masih kurang. Masyarakat belum sepenuhnya terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan Dana Kelurahan.
2. Kurangnya transparansi: Transparansi dalam pengelolaan Dana Kelurahan masih kurang, masyarakat belum sepenuhnya mengetahui bagaimana dana kelurahan digunakan.
3. Kurangnya kemampuan pemerintah kelurahan: Pemerintah kelurahan masih kurang kemampuan dalam mengelola Dana Kelurahan. Pemerintah kelurahan belum sepenuhnya memahami prosedur pengelolaan Dana Kelurahan. Masih terdapat perbedaan pemahaman diantara satu kelurahan dengan kelurahan lainnya.

Dampak Implementasi Kebijakan Dana Kelurahan

Implementasi kebijakan dana kelurahan di Kota Medan telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, seperti:

1. Peningkatan infrastruktur: Implementasi kebijakan Dana Kelurahan telah meningkatkan infrastruktur di Kota Medan, seperti jalan, jembatan dan fasilitas umum lainnya.
2. Peningkatan kesehatan: Implementasi kebijakan Dana Kelurahan telah meningkatkan kesehatan masyarakat di Kota Medan dengan menyediakan fasilitas kesehatan dan program-program kesehatan.
3. Peningkatan pendidikan: Implementasi kebijakan Dana Kelurahan telah meningkatkan pendidikan masyarakat di Kota Medan dengan menyediakan fasilitas pendidikan dan program-program pendidikan.

Implementasi dana kelurahan juga meningkatkan kemampuan wirausaha masyarakat, hal ini merupakan hasil dari kegiatan-kegiatan pelatihan kewirausahaan masyarakat, sehingga meningkatkan kemampuan keterampilan masyarakat dan menjadi sadar akan pentingnya wirausaha.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, rekomendasi yang dapat diberikan adalah:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat: Pemerintah kelurahan perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan dana kelurahan dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan Dana Kelurahan



2. Meningkatkan transparansi: Pemerintah kelurahan perlu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana kelurahan dengan menyediakan informasi yang jelas dan akurat tentang penggunaan dana kelurahan.
3. Meningkatkan kemampuan pemerintah kelurahan: Pemerintah kelurahan perlu meningkatkan kemampuan dalam mengelola dana Dana Kelurahan dengan menyediakan pelatihan dan pendampingan bagi aparat pemerintah kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2020). Statistik Kelurahan 2020.

Kementerian Dalam Negeri. (2020). Pedoman Implementasi Dana Kelurahan.

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Dana Kelurahan

Sitorus, M. (2019). Implementasi Kebijakan Dana Kelurahan di Kota Medan. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 16(2), 1-12.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Widyastuti, E. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Dana Kelurahan di Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 17(1), 1-10.

Sitasi Jurnal Sebelumnya

Hartono, S. (2020). Implementasi Kebijakan Dana Kelurahan di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 17(1), 1-12.

Kusuma, A. (2018). Implementasi Kebijakan Dana Kelurahan di Kota Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(2), 1-12.

Nurhayati, S. (2019). Pengaruh Dana Kelurahan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 8(1), 1-10.

Rachmawati, E. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Dana Kelurahan di Kota Malang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(1), 1-10.

Sitorus, M. (2019). Implementasi Kebijakan Dana Kelurahan di Kota Medan. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 16(2), 1-12.

Widyastuti, E. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Dana Kelurahan di Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 17(1), 1-10.